

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber- sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Sejak dilaksanakan otonomi daerah pada tanggal 12 Oktober 1999 diharapkan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat.

Tujuan otonomi daerah antara lain menciptakan kemandirian, pendelegasian wewenang, menggali potensi sumber-sumber daya Pemerintah Daerah agar mapan secara keuangan.

Fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata menggambarkan tidak semua Pemerintah Daerah mapan secara keuangan. Ini terlihat dari data pertumbuhan belanja daerah yang merupakan salah satu indikator dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan belanja daerah yang tidak merata.

Fenomena selanjutnya, yaitu terlihat bahwa adanya peningkatan pendapatan asli daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerahnya. Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah berupa kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak merata dalam mengalokasikan belanja daerahnya, sebagian daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sebagian lagi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah.

Menurut laporan kementerian Koordinator Bidang Ekonomi 2014, telah melaporkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung Kabupaten Lembata dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Anggaran PAD dan belanja langsung tahun 2015-2019

Tahun	PAD	Belanja Langsung
2015	Rp.28.836.775.342	Rp.113.815.880.970
2016	Rp.35.723.669.619	Rp.95.742.672.927
2017	Rp.37.992.916.558	Rp.34.526.360.663
2018	Rp.42.882.808.397	Rp.36.221.108.614
2019	Rp.51.718.452.391	Rp.47.710.559.509

Sumber : hasil penelitian 2021

Dari laporan tersebut terlihat data PAD mengalami kenaikan dan Belanja Langsung mengalami fluktuasi . Hal tersebut perlu di telusuri melihat PAD sangat besar namun Belanja Langsung daerah tidak sebanding dengan PAD.

Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya pembenahan. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaannya dari sektor pendapatan asli daerah agar mampu membiayai pengeluaran daerahnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah dengan

adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (Halim, 2008).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien

untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut (Setiawan, 2010:16). Sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak

pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakosa (2004) yang meneliti di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah, Hasilnya menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2014) yaitu: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dari hasil peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh PAD terhadap belanja Langsung secara lebih mendalam khususnya Kabupaten Lembata

Anggraeni dan Suhardjo (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2006”. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa PAD baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Rahmawati (2010) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap BD dan diterima secara signifikan

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten Lembata Tahun 2010-2019"**.

1.2. Masalah Penelitian

Dari Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten Lembata Tahun 2010-2019

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka yang menjadi persoalan penelitiannya adalah : Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja langsung pada Pemerintah kabupaten Lembata tahun 2010-2019

1.4. Tujuan Dan Kemanfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Langsung Pada Kabupaten Lembata dari tahun 2010 hingga 2019.

1.4.2. Kemanfaatan Penelitian

Dalam penelitian ini, dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang terkait, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan dan penambahan pengembangan wawasan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung dan juga menjadi Bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan informasi serta pengetahuan tentang Sektor Publik.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.

c. Bagi Pemerintah kabupaten Lembata

kontribusi empiris pada pengaruh PAD terhadap Belanja Langsung Di Kabupaten Lembata. serta Memberikan Evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Lembata dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang